



## **Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme Diera Digital Studi Pada Generasi Z Pada Universitas Pattimura**

**Theдора Giovani Leftungun**

Universitas Pattimura, Maluku, Indonesia  
Email: [thedoragiovani@gmail.com](mailto:thedoragiovani@gmail.com)

**Fricean Tutuarima**

Universitas Pattimura, Maluku, Indonesia  
Email: [friceantt@gmail.com](mailto:friceantt@gmail.com)

**Titus Gaité**

Universitas Pattimura, Maluku, Indonesia  
Email: [titogaite01@gmail.com](mailto:titogaite01@gmail.com)

*\*Corresponding Author*

### **Article History**

Submitted : 2026-02-27  
Revised : 2026-03-12  
Accepted : 2026-03-12  
Published : 2026-06-17

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v10i1.10636>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam upaya pencegahan radikalisme di era digital pada Generasi Z. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya membekali peserta didik dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi dan menolak ideologi radikal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek mahasiswa Universitas Pattimura Ambon yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Informan dipilih karena termasuk Generasi Z yang aktif menggunakan media digital dan mengikuti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya radikalisme melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan kebhinekaan. Upaya pencegahan yang efektif dilakukan melalui pembelajaran kontekstual, dialogis, dan partisipatif, seperti studi kasus, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, serta experiential learning. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi digital, masifnya penyebaran konten radikal di media sosial, dan masih dominannya metode pembelajaran yang bersifat teoritis dan konvensional.

**Kata Kunci:** Pendidikan Kewarganegaraan, Radikalisme, Generasi Z, Era Digital, Literasi Digital.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the role of Civic Education in preventing radicalism among Generation Z in the digital era. Civic Education not only equips students with an understanding of their rights and responsibilities as citizens but also strengthens their ability to confront and reject radical ideologies. This research employed a qualitative approach involving students from Pattimura University Ambon, representing the Faculty of Social and Political Sciences, Faculty of Law, Faculty of Economics and Business, and Faculty of Teacher Training and Education. The informants were selected because they belong to Generation Z, actively use digital media, and participate in Civic Education courses at the university level. Data were collected through observation and interviews and analyzed using an interactive data analysis model. The findings indicate that Civic Education contributes positively to increasing students' awareness of the dangers of radicalism through the internalization of the values of Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), democracy, human rights, tolerance, and diversity. Effective prevention efforts are implemented through contextual, dialogic, and participatory learning approaches, including case studies, problem-based learning, project-based learning, and experiential learning. The main challenges include low levels of digital literacy, the widespread dissemination of radical content on social media, and the continued dominance of theoretical and conventional teaching methods.*



## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu usaha sadar kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, yang mempunyai tujuan lebih tinggi dari sekedar untuk hidup. () Tujuan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah menciptakan kompetensi kewarganegaraanyang baik sehingga dapat berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis. Konsep dan materi nilainilai patriotisme, kesadaran setiap warga negara, partisipasi warga negara, hak, dan kewajiban, perlu dipelajari dan dipahami sebagai identitas dalam konsep persatuan (Khanaya et al., 2025) Hal tersebut tergambar bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran pentingdalam membina warga negara Indonesia agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperkuat Bhinneka Tunggal Ika dengan tetap menjaga dan mempertahankan ciri khas bangsa Contohnya, banyak permasalahan sekarang ini tentang tindakan anarkis, berita hoax, bullying, ketimpangan sosial, paham radikal adalah era yang dihadapi generasi Z.

Hal tersebut tergambar bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran pentingdalam membina warga negara Indonesia agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperkuat Bhinneka Tunggal Ika dengan tetap menjaga dan mempertahankan ciri khas bangsa Contohnya, banyak permasalahan sekarang ini tentang tindakan anarkis, berita hoax, bullying, ketimpangan sosial, paham radikal adalah era yang dihadapi generasi z.

Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan pengebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Tentu saja melakukan perubahan (pembaruan) merupakan hal yang wajar dilakukan bahkan harus dilakukan demi menuju masa depan yang lebih baik. Namun perubahan yang sifatnya revolusioner sering kali “memakan korban” lebih banyak sementara keberhasilannya tidak sebanding. Sebagian ilmuwan sosial menyarankan perubahan dilakukan secara perlahan-lahan, tetapi kontinu dan sistematis, ketimbang revolusioner tetapi tergesa-gesa (Naeli Rokhmah, 2020). Generasi z adalah kelompok yang lahir antara 1995 dan 2010, tumbuh di era internet dapat perkembangan digital yang pesat. Mereka sangat bergantung pada smartphone dan menginternalisasi nilai dari berbagai agen sosialisasi, dengan orangtua tetap menjadi yang paling sentral. (Oktavia Ramadhani & Khoirunisa Khoirunisa, 2025)

Dalam era digital yang penuh dengan tantangan informasi, keterampilan seperti pemahaman sumber daya, verifikasi informasi, dan penggunaan alat-alat analisis menjadi semakin esensial. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu siswa mengasah keterampilan-keterampilan ini sehingga mereka dapat dengan lebih efektif memilah informasi, mengidentifikasi berita palsu, dan berpartisipasi dalam dialog yang kritis di media sosial. Maka dari itu setiap warga negara diharapkan bisa berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan (Gunawan et al., 2022) Di negara yang sangat multicultural seperti Indonesia paham radikalisme sangat di tantang dikarenakan di Indonesia hidup dengan banyak perbedaan, mulai dari perbedaan budaya,ras,serta agama yang dimana itu di jamin oleh negara baik itu terisat pada pancasila atau undang undang. Radikalisme juga merupakan cikal bakal terjadinya tindak terorisme yang dimana tindakan terorisme sangatmengganggu kestabilan suatu negara apalagi negara seperti Indonesia.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang dampak dari perilaku yang mereka tunjukkan di media sosial. Generasi muda sering kali mengekspresikan diri tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka, yang dapat berujung pada konflik sosial dan masalah psikologis. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan yang menekankan pada etika digital dan tanggung jawab sosial, sehingga mereka dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab (Permana et al., 2023) Radikalisme di kalangan generasi muda, khususnya generasi z, menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Di era digital seperti saat ini, penyebaran paham radikal sangat mudah dilakukan melalui media sosial dan platform digital lainnya.

Hasil penelitian (Muhamad Mustain Nasoha et al., 2025)menunjukkan bahwa PKn yang inovatif, termasuk pendekatan berbasis proyek dan kolaborasi dengan platform digital, dapat meningkatkan ketahanan ideologis Gen Z terhadap propaganda radikal, dengan tingkat efektivitas hingga 70% berdasarkan studi kasus di sekolah-sekolah Indonesia. Sementara itu, penelitian (Wika Ndraha, n.d.) Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila tentang toleransi dan keberagaman yang merupakan landasan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan damai. Apalagi pendekatan ini efektif membentuk kesadaran kritis mahasiswa terhadap ancaman ideologi radikal dan ekstremis. Kajian ini juga menyoroti pentingnya memasukkan materi anti-radikalisme ke dalam kurikulum secara komprehensif dan dialogis.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, baik secara teoretis maupun praktis, yang didasari oleh beberapa faktor krusial seperti ancaman radikalisme yang bertransformasi ke ruang digital radikalisme tidak lagi hanya terjadi melalui pendekatan fisik atau organisasi tertutup, melainkan telah bergeser ke ranah digital. kerentanan generasi Z dalam identitas dan

ideologi generasi z berada dalam fase pencarian jati diri yang intens serta Kesenjangan antara Kurikulum PKn dan Realitas Digital Secara teoretis, materi PKn di perguruan tinggi seringkali masih bersifat konvensional dan kurang menyentuh dinamika isu kontemporer seperti cyber-radicalism, fake news, dan etika bermedia sosial. Penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna mengidentifikasi kesenjangan tersebut dan merumuskan bagaimana materi PKn dapat diintegrasikan dengan literasi digital agar relevan dengan kebutuhan zaman.

Berdasarkan observasi awal dan latar belakang melalui penelitian ini, penulis ingin mendorong upaya pemahaman yang lebih mendalam tentang peran pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk sikap toleransi, nasionalisme, dan anti-radikalisme di kalangan mahasiswa. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan strategi pendidikan kewarganegaraan yang lebih efektif, kontekstual, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penguatan pemahaman melalui pendidikan kewarganegaraan, mengetahui solusi dalam mengatasi berbagai ancaman radikalisme dari perspektif pendidikan kewarganegaraan serta tantangan apa saja dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya pencegahan radikalisme di era digital.

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif, Menurut Saryono (2010) penelitian kualitatif digunakan dalam suatu penelitian untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan serta menjelaskan serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan Universitas Pattimura. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa FISIP, Mahasiswa Fakultas Hukum, Mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis dan Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara.

Menurut Sugiyono (2018) bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam satuan, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Dengan Teori Pendekatan kualitatif teknik ini menekankan pada analisis deskriptif. Dengan demikian analisis Deskriptif kualitatif ini memberikan penafsiran terhadap data-data yang ada, setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisa dan disajikan sesuai dengan variabel-variabel yang dijadikan indikator dalam penulisan ini, untuk selanjutnya mendapatkan gambaran yang jelas tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya pencegahan radikalisme di era digital studi pada gen Z.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Upaya Penguatan Pemahaman Bahaya Radikalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan Hasil observasi menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap bahaya radikalisme. Hal ini tercermin dari meningkatnya kesadaran mahasiswa tentang ciri-ciri radikalisme, dampak negatifnya terhadap persatuan bangsa, serta pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan kewarganegaraan dalam membangun warga negara yang baik mengembangkan tiga kompetensi yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter (*civic disposition*). *Civic disposition* merupakan komponen ketiga dari *civic competence* (kompetensi warga negara) yang berkaitan dengan sikap, watak dan juga karakter dari warga negara. (Fardin dan Fricean Tutuarima, n.d.)

Dalam konteks digital, teori ini diperluas dengan konsep *digital citizenship* yang menekankan kemampuan warga negara dalam menggunakan media digital secara etis, kritis, dan bijak termasuk ketahanan terhadap misinformasi, propaganda radikal, hoaks, serta ujaran kebencian yang tersebar di media sosial dan platform daring. Pendidikan kewarganegaraan menjadi alat untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan karakter kebangsaan yang moderat di tengah arus informasi digital yang cepat dan luas. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bersama masyarakat, bangsa, dan negara adalah hasil langsung dari kesadaran akan perilaku, yang dimulai dari dalam diri, dan mendorong terbentuknya keyakinan, kepedulian terhadap sesama, rasa kebangsaan, dukungan pada sistem demokrasi, dan keadilan (Fardin dan Fricean Tutuarima, n.d.)

Setiawan berpendapat bahwa penguatan pemahaman bahaya radikalisme melalui Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus dilakukan secara sistematis melalui diskusi kasus nyata, pembelajaran berbasis masalah, dan refleksi nilai Pancasila. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menanamkan sikap anti-radikalisme pada generasi Z. (Setiawan et al., n.d.)

Upaya Penguatan Pemahaman Bahaya Radikalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat strategis dan signifikan dalam membangun kesadaran mahasiswa terhadap bahaya radikalisme di lingkungan perguruan tinggi. Hasil observasi menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pengertian radikalisme, ciri-ciri, bentuk, serta dampak negatifnya terhadap persatuan bangsa, stabilitas sosial, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Radikalisme dipahami oleh mahasiswa sebagai suatu paham, ideologi, atau sikap yang menghendaki perubahan secara mendasar dan ekstrem, sering kali menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, prinsip demokrasi, toleransi, serta keberagaman. Radikalisme tidak hanya dimaknai sebagai tindakan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup pemaksaan kehendak, intoleransi, eksklusivisme, penolakan terhadap perbedaan, serta penyebaran ideologi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Pemahaman ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesadaran awal yang cukup baik terhadap kompleksitas ancaman radikalisme. Hal ini diungkapkan oleh beberapa narasumber, termasuk Imanuel Kerly Lasamahu dan Melisa Lernaya yang menekankan radikalisme merupakan perubahan mendasar dan ekstrem dan sering kali menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa secara konseptual, materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah memuat nilai-nilai dasar yang relevan untuk mencegah radikalisme, seperti nilai Pancasila, nasionalisme, demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan kebhinekaan. Namun demikian, pemahaman mahasiswa terhadap bahaya radikalisme belum sepenuhnya merata dan optimal. Sebagian mahasiswa menilai bahwa pembelajaran PKn masih cenderung bersifat teoritis, terlalu berfokus pada buku teks, dan kurang mengaitkan materi dengan fenomena radikalisme yang nyata dan kontekstual di lingkungan kampus. Hal ini diungkapkan oleh beberapa narasumber, termasuk violeta maitimu dan joe soelisa yang menekankan bahwa pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan belum cukup optimal dalam menyampaikan pemahaman yang lebih akurat tentang bahaya radikal

Wawancara dengan mahasiswa dari berbagai fakultas menunjukkan adanya perbedaan pengalaman dan tingkat pemahaman terhadap materi radikalisme. Faktor metode pembelajaran, gaya penyampaian dosen, serta daya tangkap individu mahasiswa menjadi penentu utama efektivitas pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Mahasiswa menilai bahwa pendekatan pembelajaran yang monoton dan kurang komunikatif dapat mengurangi pemahaman, sementara pendekatan yang interaktif, sederhana, dan mudah dipahami justru mampu meningkatkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap bahaya radikalisme. Pendekatan pembelajaran yang paling efektif dalam penguatan pemahaman bahaya radikalisme adalah pendekatan kontekstual dan partisipatif, seperti studi kasus nyata, diskusi kritis, dialog terbuka, pembelajaran berbasis masalah, debat, serta pembelajaran berbasis proyek sosial. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menolak paham radikal secara kritis dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era digital yang sarat dengan arus informasi dan propaganda ideologi ekstrem. Selain peran pembelajaran di dalam kelas, organisasi

kemahasiswaan memiliki kontribusi yang sangat penting sebagai wadah penguatan pemahaman anti-radikalisme. Organisasi mahasiswa berperan sebagai ruang diskusi, sharing pengalaman, pembentukan kepemimpinan yang demokratis dan inklusif, serta penguatan nilai toleransi, solidaritas, dan persatuan. Melalui kegiatan seminar, sosialisasi, dialog lintas budaya dan agama, serta kampanye kebangsaan, organisasi mahasiswa dapat menjadi benteng awal dalam mencegah masuk dan berkembangnya paham radikal di kalangan mahasiswa. Hal ini diungkapkan oleh beberapa narasumber termasuk Joe Resubun dan Merna Bonara yang menekankan pembelajaran yang paling efektif dalam penguatan pemahaman bahaya radikalisme adalah pendekatan kontekstual dan partisipatif, seperti studi kasus nyata, diskusi kritis, dialog terbuka, pembelajaran berbasis masalah, debat, serta pembelajaran berbasis proyek

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penguatan pemahaman bahaya radikalisme tidak hanya bergantung pada institusi pendidikan dan dosen, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran diri mahasiswa. Kesadaran individu untuk berpikir kritis, mengontrol diri dari provokasi, meningkatkan literasi digital, serta menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku sehari-hari menjadi kunci utama dalam membentengi diri dari pengaruh radikalisme. Hal ini diungkapkan oleh narasumber termasuk Darma Imoliana dan Sam Rahareng yang menekankan perlu kesadaran diri atau individu agar mengontrol dan juga tidak terprovokasi dan mampu menangkal diri dari paham-paham radikalisme

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki potensi besar sebagai instrumen strategis dalam pencegahan radikalisme di kalangan mahasiswa. Namun, efektivitasnya perlu terus ditingkatkan melalui penguatan metode pembelajaran yang kontekstual, kolaborasi antara dosen, organisasi kemahasiswaan, dan pihak kampus, pemanfaatan media digital secara positif, serta penanaman budaya kampus yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, toleransi, kebhinekaan, dan persatuan. Upaya ini diharapkan mampu membentuk mahasiswa sebagai generasi muda yang kritis, moderat, toleran, dan berkomitmen dalam menjaga keutuhan NKRI

### **Solusi Dalam Mengatasi Berbagai Ancaman Radikalisme Dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan**

Berdasarkan hasil observasi wawancara mahasiswa dari berbagai fakultas untuk menggali pandangan, pengalaman, serta pemahaman informan terkait peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mencegah dan menangkal berkembangnya paham radikalisme untuk dapat memberikan gambaran mengenai solusi strategis dalam mengatasi ancaman radikalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan, sekaligus memperkuat temuan penelitian berdasarkan

perspektif langsung dari mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses pendidikan di perguruan tinggi hal ini dikemukakan juga oleh beberapa para ahli :

Menurut Suyanto dan Hisyam, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan instrumen strategis dalam pencegahan radikalisme karena berfungsi menanamkan nilai karakter, nasionalisme, dan wawasan kebangsaan. Mereka menegaskan bahwa solusi utama dalam menghadapi ancaman radikalisme adalah melalui pembelajaran kewarganegaraan yang bersifat kontekstual, integratif, dan berorientasi pada penguatan nilai Pancasila sehingga peserta didik mampu membentengi diri dari ideologi ekstrem, terutama di era digital (Suyanto, 2000).

Sejalan dengan pendapat tersebut, (Setiawan et al., n.d.) menyatakan bahwa pencegahan radikalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan harus dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan metode pembelajaran berbasis studi kasus, diskusi kritis, dan pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*). Menurutnya, pendekatan ini merupakan solusi efektif untuk meningkatkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap bahaya radikalisme karena mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menganalisis dan menolak paham radikal secara rasional dan reflektif. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber

Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai solusi utama dan preventif dalam menghadapi ancaman radikalisme. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat (Suyanto, 2000) yang menegaskan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menanamkan nilai karakter, nasionalisme, dan wawasan kebangsaan. Melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, mahasiswa dibekali benteng ideologis yang kuat untuk menolak ideologi ekstrem, baik secara langsung maupun melalui media digital. Hal ini sejalan dengan narasumber Gabriel enus yang menekankan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat menjadi strategi efektif menangkal radikalisme daring dengan mengadaptasi materi menjadi konten digital menarik (seperti video pendek, infografis, dan podcast) yang mengedukasi bahaya radikalisme dan teknik verifikasi informasi, sekaligus melatih mahasiswa berpikir kritis dalam menganalisis narasi ekstrem di dunia maya.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat strategis dan fundamental dalam mencegah serta menangkal berkembangnya paham radikalisme di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di era digital saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa radikalisme di kalangan mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain minimnya pemahaman tentang radikalisme, rendahnya literasi kebangsaan dan literasi digital, pengaruh pergaulan dan kelompok eksklusif, fanatisme berlebihan, egoisme, serta pemanfaatan media sosial yang tidak disertai kemampuan menyaring informasi. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya ruang dialog terbuka, inklusif, dan kritis di lingkungan kampus, sehingga mahasiswa yang merasa tidak

terwadahi cenderung mencari ruang alternatif yang berpotensi mengarahkan pada paham-paham radikal. Hal ini diungkapkan oleh beberapa narasumber termasuk, Brayen laturissa dan mezra bakarbesy menekankan bahwa faktor utama muncul radikal yaitu egosime seseorang bahkan pergaulan yang membuat daya paham seseorang yang dangkal hingga mengakibatkan pemahaman yang salah hingga perlakuan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila

Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai solusi utama dan preventif dalam menghadapi ancaman radikalisme. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Suyanto dan Hisyam (2022) yang menegaskan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menanamkan nilai karakter, nasionalisme, dan wawasan kebangsaan. Melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, mahasiswa dibekali benteng ideologis yang kuat untuk menolak ideologi ekstrem, baik secara langsung maupun melalui media digital. Hal ini sejalan dengan narasumber Gabriel enus yang menekankan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat menjadi strategi efektif menangkal radikalisme daring dengan mengadaptasi materi menjadi konten digital menarik (seperti video pendek, infografis, dan podcast) yang mengedukasi bahaya radikalisme dan teknik verifikasi informasi, sekaligus melatih mahasiswa berpikir kritis dalam menganalisis narasi ekstrem di dunia maya.

Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang kontekstual, dialogis, dan berbasis masalah menjadi kunci efektivitas pencegahan radikalisme. Metode seperti diskusi kritis, studi kasus, project-based learning, dan experiential learning mampu meningkatkan kesadaran kritis mahasiswa, sebagaimana dikemukakan oleh Setiawan (2024). Mahasiswa tidak hanya memahami konsep radikalisme secara teoritis, tetapi juga mampu menganalisis, mengkritisi, dan menolak narasi radikal secara rasional dan reflektif. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh beberapa narasumber termasuk Alsains Amahorseya yang menekankan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menjadi Kurikulum yang menggunakan pendekatan *Pancasila-Action* ( Tindakan Pancasila ) dengan Metode *Experiential Learning* ( pembelajaran pengalaman ) Mewajibkan mahasiswa menyelesaikan Tugas Akhir Mata Kuliah berupa Proyek Aksi Kewarganegaraan (*Civic Action Project*) di masyarakat (misalnya, mendampingi UMKM, mengajar anak putus sekolah, atau terlibat dalam konservasi lingkungan). Tujuannya adalah menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial yang berakar pada sila-sila Pancasila,

Hasil wawancara menunjukkan adanya kesepakatan kolektif mahasiswa mengenai pentingnya peran dosen, fakultas, dan universitas dalam menciptakan lingkungan kampus yang anti-radikalisme. Dosen dipandang tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan nilai toleransi, sikap dialogis, dan pemikiran kritis. Fakultas dan universitas berperan sebagai fasilitator melalui penyediaan ruang diskusi terbuka, kegiatan lintas agama dan budaya, seminar

kebangsaan, kebijakan anti-diskriminasi, serta pengawasan terhadap aktivitas kemahasiswaan. Menurut Susanto dan Lestari (2023) menegaskan bahwa solusi pencegahan radikalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya terbatas pada pembelajaran di kelas, tetapi juga harus didukung oleh budaya kampus dan kegiatan kemahasiswaan. Mereka menyatakan bahwa kolaborasi antara dosen, organisasi kemahasiswaan, dan institusi perguruan tinggi sangat penting dalam membangun lingkungan akademik yang inklusif, toleran, dan menjunjung tinggi nilai Pancasila sebagai benteng terhadap masuknya paham radikal. Hal ini diungkapkan oleh beberapa mahasiswa termasuk Brayen laturissa yang menekankan bahwa solusinya sebagaimana universitas ataupun fakultas bahkan dosen seharusnya yang menjadi fasilitator untuk mahasiswa dapat bergerak contoh pembagian brosur ,ataupun konten edukasi tentang radikalisme bukan saja untuk mahasiswa namun juga kepada Masyarakat dengan pemanfaatan yang harus dilakukan yaitu bagaimana sebuah organsasi dalam fakultas contoh DPMF, BEM membuat konten tentang bahaya radikal dapat dibuat semenarik mungkin agar dapat ditonton dengan baik oleh semua orang

Pemanfaatan media digital secara positif menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Mahasiswa menilai bahwa media digital dapat menjadi sarana efektif dalam pencegahan radikalisme apabila digunakan untuk produksi konten edukatif, kampanye toleransi, literasi digital, analisis konten radikal, serta penyebaran nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga agen perubahan yang aktif menyebarkan narasi kebangsaan dan perdamaian. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh beberapa narasumber termasuk muja buano yang menekankan bahwa memberikan pemahaman tentang radikalisme bukan saja pemahaman namun praktek dari dosen untuk tidak masuk dalam paham-paham radikal dan dosen seharusnya mewajibkan mahasiswa agar mengupdate ha-hal positif hal ini seperti tema paham radikal dan bahaya radikal dengan ini saya rasa pemanfaatan media didigital bisa tepenuhi dengan baik namun sejauh ini sudah baik dalam proses pembelajaran tentang toleransi namun bagaiman kita sebagai mahasiswa mengimplementasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencegahan radikalisme di lingkungan perguruan tinggi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi antara Pendidikan Kewarganegaraan, dosen, fakultas, universitas, serta mahasiswa itu sendiri. Pendidikan Kewarganegaraan yang direvitalisasi menjadi pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis nilai Pancasila terbukti mampu menjadi solusi strategis dalam membentengi mahasiswa dari ancaman radikalisme dan memperkuat kehidupan kampus yang demokratis, toleran, dan berkeadaban.

## **Tantangan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme Diera Digital.**

Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk sikap, keterampilan, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Diera digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan dinamika sosial yang kompleks, termasuk tantangan dalam penyebaran informasi dan pengaruh ideologi radikal melalui berbagai platform digital yang mudah diakses oleh masyarakat luas apalagi pada generasi Z sekarang .

Radikalisme sendiri merupakan paham yang berupaya melakukan perubahan sosial-politik secara ekstrem dan sering menggunakan usaha yang bersifat destruktif (merusak) maupun intoleran terhadap nilai kebangsaan dan keberagaman. Kasus radikalisme di kalangan generasi muda atau generasi Z yang akrab dengan ruang digital menjadi ancaman nyata terhadap persatuan dan stabilitas sosial negara (Nurlaila, 2018).

Hasil observasi pada fakultas-fakultas yang berada pada universitas pattimura ambon menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan terdapat berbagai dinamika pembelajaran yang belum sepenuhnya mampu merespon tantangan kontemporer, khususnya dalam mengantisipasi penyebaran paham radikalisme di kalangan mahasiswa di era digital. Fenomena ini tampak dari masih rendahnya literasi digital mahasiswa terhadap konten-konten ideologis di media sosial dan platform digital lain, yang berpotensi menjadi ruang berkembangnya narasi radikal. Data observasi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan generasi muda sebagai “digital natives” memiliki kerentanan tinggi terhadap paparan ideologi radikal melalui media digital jika tidak dibarengi dengan keterampilan berpikir kritis dan wawasan kebangsaan yang kuat.

Menurut Nugroho radikalisme berkembang karena lemahnya literasi kewarganegaraan dan rendahnya kemampuan berpikir kritis generasi muda. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan harus diarahkan sebagai sarana penguatan literasi ideologi negara, literasi digital, dan kesadaran konstitusional. Pendidikan kewarganegaraan yang kritis dinilai mampu menjadi solusi preventif dalam menghadapi propaganda radikal yang banyak tersebar melalui media sosial dan platform digital. (Nugroho & Hernawan, 2019).

Di sisi lain, Setiawan mengemukakan bahwa tantangan utama dalam menghadapi radikalisme di era digital meliputi akses teknologi tanpa filter efektif, algoritma media sosial yang memperkuat bias konfirmasi, serta kurangnya literasi digital di kalangan pelajar, yang membutuhkan strategi kolaboratif antara pendidik, keluarga, dan pembuat kebijakan pendidikan. (Setiawan et al., n.d.).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi lapangan serta wawancara dengan mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Pattimura Ambon, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis sebagai upaya preventif dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme di era digital, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di era digital adalah belum optimalnya adaptasi metode pembelajaran terhadap perkembangan teknologi digital. Sebagian besar informan menyampaikan bahwa pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan masih didominasi oleh metode konvensional seperti ceramah satu arah, penugasan berbasis teks, dan pendekatan hafalan. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran kurang menarik dan kurang kontekstual bagi mahasiswa, khususnya Generasi Z yang sangat akrab dengan media digital dan konten visual interaktif. Akibatnya, pesan-pesan kebangsaan dan pencegahan radikalisme tidak tersampaikan secara efektif dan berpotensi kalah bersaing dengan narasi radikal yang dikemas secara lebih menarik di media sosial.

Selain itu, rendahnya literasi digital dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa menjadi tantangan signifikan dalam upaya pencegahan radikalisme. Arus informasi digital yang cepat, tidak terfilter, serta algoritma media sosial yang memperkuat bias informasi membuat mahasiswa rentan terpapar konten radikal, hoaks, dan propaganda ideologis. Banyak mahasiswa mengakui bahwa konten radikal sering disajikan secara persuasif, emosional, dan terselubung sehingga sulit dikenali tanpa kemampuan analisis yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan belum sepenuhnya berhasil membekali mahasiswa dengan keterampilan literasi digital kritis yang diperlukan untuk menyaring dan menolak paham radikalisme di ruang digital. Hal ini diungkapkan oleh beberapa narasumber termasuk Melisa lernaya dan merna bonara yang menekankan Minimnya literasi digital kritis mahasiswa, yang menyebabkan sulit membedakan antara informasi edukatif dan propaganda radikal.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan literasi digital antara dosen dan mahasiswa, yang berdampak pada terbatasnya pemanfaatan media dan platform digital secara inovatif dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan meskipun secara teknis kampus telah mengadopsi beberapa platform daring, pemanfaatannya masih bersifat administratif dan belum diarahkan pada penguatan nilai kebangsaan, pengembangan kontra-narasi radikal, serta diskusi kritis berbasis isu aktual. Kondisi ini menjadi tantangan struktural dalam menjadikan pembelajaran Pendidikan Pancasila sebagai instrumen efektif pencegahan radikalisme di era digital. Hal ini diungkapkan oleh beberapa narasumber termasuk joe resubun dan joy titahena yang menekankan kesenjangan literasi antara dosen dan mahasiswa maka itu

media sosial sangat berpengaruh di era sekarang karena isu-isu yang menyebar lebih cepat jika tidak menyaring maka upaya pencegahannya yaitu dengan kita harus berhati-hati dalam berasumsi dan dalam menyikapi konten-konten tersebut maka perlu pelatihan literasi digital kritis bagi dosen dan mahasiswa agar mampu mengenali serta menangkal narasi radikal. Selain itu, kampus harus mendorong kreasi konten positif melalui kompetisi serta mengintegrasikan kearifan lokal seperti nilai *Pela Gandong* ke dalam kampanye digital, sehingga upaya pencegahan radikalisme menjadi lebih kontekstual, relevan, dan efektif menjangkau generasi muda”.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan adanya kesadaran kritis mahasiswa akan pentingnya peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentengi diri dari pengaruh radikalisme. Mahasiswa menilai bahwa Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan tetap relevan sebagai sarana penguatan nilai Pancasila, toleransi, kebhinekaan, dan persatuan, asalkan dikemas secara adaptif, interaktif, dan kontekstual. Oleh karena itu, dukungan institusional dari kampus menjadi faktor penting, antara lain melalui pengembangan kurikulum Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan berbasis digital, pelatihan literasi digital bagi dosen dan mahasiswa, penyediaan platform pembelajaran interaktif, serta pembukaan ruang dialog dan diskusi yang inklusif. Hal ini diungkapkan oleh beberapa narasumber termasuk Michael Jonathan dan Joy Titahena yang menekankan menyediakan pelatihan literasi digital bagi mahasiswa dan dosen agar dapat membuka ruang belajar yang tidak cenderung dengan pembelajaran yang hanya satu arah terutama dalam seminar anti radikal dan perlu adanya dukungan dari dosen untuk membuka ruang diskusi serta mendengarkan aspirasi mahasiswa dan dapat mendukung juga pembuatan konten digital tentang radikalisme sebagaimana dapat menjadi rumah agar setiap permasalahan harus di diskusi dengan baik tanpa melakukan kekerasan”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya pencegahan radikalisme di era digital terletak pada aspek metodologis, literasi digital, dan kesiapan institusional. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan transformasi pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada penguatan kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan secara kontekstual. Apabila tantangan ini dapat diatasi secara komprehensif, Pendidikan Kewarganegaraan berpotensi menjadi garda terdepan dalam mencegah radikalisme dan memperkuat ketahanan ideologis generasi muda di era digital.

## SIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peran yang sangat strategis dan fundamental dalam upaya pencegahan dan penangkalan paham radikalisme di lingkungan perguruan tinggi. PKn terbukti berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai definisi, ciri-ciri, serta dampak negatif radikalisme terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan nilai-nilai Pancasila. Namun, efektivitas pembelajaran PKn saat ini masih menghadapi tantangan yang kompleks, terutama di era digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemahaman konseptual mahasiswa cukup baik, proses pembelajaran masih cenderung bersifat teoritis, konvensional, dan kurang kontekstual. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi digital dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, serta kesenjangan literasi antara dosen dan mahasiswa, yang membuat mereka rentan terhadap paparan narasi radikal yang terselubung di media sosial.

Oleh karena itu, solusi strategis untuk mengatasi ancaman radikalisme memerlukan transformasi dan revitalisasi pembelajaran PKn yang meliputi penerapan metode kontekstual dan partisipatif yaitu Menggeser metode ceramah menjadi diskusi kritis, studi kasus nyata, *problem-based learning*, dan proyek aksi kewarganegaraan (*civic action*) yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan Media Digital Positif dengan mengadaptasi materi menjadi konten digital yang menarik (*video, infografis, podcast*) untuk membangun kontra-narasi dan meningkatkan literasi digital kritis. Kemudian sinergi Multistakeholder yaitu membangun kolaborasi yang kuat antara dosen, fakultas, universitas, dan organisasi kemahasiswaan dalam menciptakan budaya kampus yang inklusif, toleran, dan demokratis. Dan Penguatan Kesadaran Diri dengan menumbuhkan kesadaran individu mahasiswa untuk berpikir kritis, mengontrol diri dari provokasi, dan menginternalisasi nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari. Secara keseluruhan, Pendidikan Kewarganegaraan berpotensi menjadi garda terdepan dalam membentengi generasi muda dari radikalisme, asalkan pelaksanaannya diadaptasi secara adaptif, inovatif, dan didukung oleh lingkungan institusi yang kondusif. Upaya ini diharapkan mampu membentuk mahasiswa yang kritis, moderat, dan berkomitmen penuh dalam menjaga persatuan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fardin dan Fricen Tutuarima. (n.d.). *Penguatan Civic Disposition (Watak Kewarganegaraan) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Ambon Dalam Mempersiapkan Generasi Muda di Era Revolusi 5.0*.
- Gunawan, R. Z., Fatma, &, & Najicha, U. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Moral Pelajar Di Era Modern. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Khanaya, H., Silitonga, T., Arini, D., Marsoit, S., Br Naibaho, M. C., Yunita, S., Dosen, P., & Indonesia, M. (2025). *Indonesian Journal of Learning Studies Membangun Warga Negara*

Ideal: Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Indonesia. *Indonesian Journal of Learning Studies (IJLS)*, 5(2), 2025.

- Muhamad Mustain Nasoha, A., Riskiya Putri, N., Renata Andyne, Y. R., Nur Aslami, R., & Rindu Az Zahra, A. (2025). *Analisis Kritis Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Cyber Radicalism di Kalangan Gen Z* (Vol. 2, Number 5). <https://litera-academica.com/ojs/litera/>
- Naeli Rokhmah. (2020). Analisis Terhadap Vlog M Ulil Albab Sebagai Media Untuk Melawan Paham Radikalisme. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 4 no. 2 (2020).
- Ndraha<sup>1</sup>, W., Pamungkas, A., Maharani, C., Mai, N., Saragih, R., Zhafran Syafiq, M., & Wahyudin, P. (n.d.). *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pilar Anti Radikalisme Dan Ekstremisme*.
- Nurlaila. (2018). Radikalisme di Kalangan Terdidik. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 1(02), 266–285. Doi: <https://doi.org/10.37542/iq.v1i02.19>
- Permana, I. S., Ngiliyun, A., & Ahmad Subagia, H. (2023). Upaya Meningkatkan Etika Bermedia Digital Bagi Siswa Di SMP PGRI Karangampel. *ADIMA Jurnal Awatara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 25–30. Doi: <https://doi.org/10.61434/adima.v1i1.133>
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Alfabeta.
- Setiawan, L., Karya, S., & Kediri, H. (n.d.). *Sikap Mahasiswa D3 Keperawatan Terhadap Radikalisme*. Retrieved <https://journal-mandiracendikia.com/jip-mc>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.